

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah)**

Ikang Murapi

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram,  
*ikang.murapi@yahoo.com*

**Abstract**

*This study was conducted to determine the factors that affect the information quality of local government financial reports. Collecting data this study used a questionnaire survey. The data collected is then processed using SPSS version 17.0. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. Results of hypothesis testing is the implementation of the Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology and Internal Control System The government has a positive and significant impact on Information Quality of Local Government Financial Statements, but do not be influenced by the Human Resource Competency.*

**Keywords:** *Information Quality Financial Statements, Competence of Human Resources Systems Regional Financial Accounting, Information Technology, Government Internal Control System*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi tidak dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia.

**Kata kunci:** Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**PENDAHULUAN**

Semenjak reformasi ditahun 1998 dan Otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999) akuntansi sektor publik mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga organisasi sektor publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah sesuai dengan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005. Kemudian laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK). LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I tahun 2014 opini BPK untuk LKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, oleh: Desi dan Ertambang (2008); Celviana dan Rahmawati (2010); Madjham (2012); Darno (2012); Sukmaningrum (2012); Permadi (2013); Armando (2013); Mahaputra (2014); Desianawati (2014). Mengacu pada penelitian terdahulu penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, bertujuan untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga untuk memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penting dalam menghasilkan kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupatn Lombok Tengah. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis termotivasi melakukan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupatn Lombok Tengah baik secara parsial maupun simultan?

#### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Desi dan Ertambang (2008)) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Darno (2012) menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Mahaputra (2014) menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Desianawati (2014) hasil penelitian ini menemukan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dibangun adalah:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Permadi (2013) menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik.

Desianawati (2014) hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dibangun adalah:

H2: Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Desi dan Ertambang (2008) yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Celviana dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu Teknologi Informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Darno (2012) berhasil menemukan bukti adanya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan barang kuasa pengguna. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dibangun adalah.

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Madjham (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Sistem Pengendalian Intern dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asert Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Armando (2013) terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif.

Mahaputra (2014) Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dibangun adalah:

H4: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif / hubungan

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono 2011:14). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal (*causal effect*) yaitu hubungan yang terjadi karena sebab akibat, yang menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima point skala *Likert*.

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan *Tabachinick* dan *Fidell* (2007). Sampel terpilih sebanyak 117 reponden dari 39 SKPD dengan maksimal 3 responden ditiap SKPD di Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan 3 responden pada tiap SKPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi Kasubag Keuangan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Umum yang mengetahui secara pasti mengenai pelaporan keuangan pada tiap SKPD.

#### **Definisi Operasional Variabel**

##### **Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan indikator yaitu : Aktivitas keuangan di masa lalu, ketepatanwaktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur, informasi dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami, sesuai SAP. Jumlah item pertanyaan adalah 9 item, diukur menggunakan skala *Likert* 1-5. Kriteria tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Bastian (2006), dan Armando (2013).

##### **Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel kompetensi sumber daya manusia

diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Xu, *et al.* (2003) yaitu : Pemahaman tentang akuntansi, SDM yang berkualitas, sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, sosialisasi peraturan baru, pemahaman tentang struktur organisasi. Jumlah item pertanyaan adalah 10 item, diukur menggunakan skala Likert 1-5. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Celviana dan Rahmawati (2010), Darno (2012), Sukmaningrum (2012), dan Desianawati (2014).

Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator yaitu : Kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, laporan keuangan setiap periode, pelaporan yang konsisten dan periodik. Jumlah item pertanyaan adalah 11 item, diukur menggunakan skala *Likert* 1-5. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Halim (2013), Permadi (2013), dan Desianawati (2014).

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator yaitu: Sistem akuntansi sesuai SAP, jaringan internet, jaringan internet termamfaatkan dengan baik, aplikasi yang digunakan, laporan keuangan terkomputerisasi, software sesuai dengan UU. Jumlah item pertanyaan adalah 10 item, diukur menggunakan skala *Likert* 1-5. Kriteria tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 dan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Celviana dan Rahmawati (2010), dan Darno (2012).

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan indikator yaitu : *Standard Operating Procedure* (SOP), implementasi PP No 60 tentang SPIP, dokumen dan catatan yang memadai, pemisahan wewenang, tindakan disiplin atas pelanggaran. Jumlah item pertanyaan adalah 5 item, diukur menggunakan skala *Likert* 1-5. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Armando (2013).

**Prosedur Analisis data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji analisis kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependennya), baik secara parsial maupun simultan. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$KILK = \alpha + \beta_1 \text{ SDM} + \beta_2 \text{ SAKD} + \beta_3 \text{ TI} + \beta_4 \text{ SPI} + e$$

Dimana:

- KILK = Kualitas informasi laporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefesien Regresi
- SDM = Kompetensi Sumber daya manusia
- SAKD = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- TI = Teknologi Informasi
- SPI = Sistem Pengendalian Intern
- e = Error

**PEMBAHASAN**

**Deskripsi Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 117 kuesioner yang diantar langsung ke 39 SKPD Kabupaten Lombok Tengah dengan responden sebanyak 117. Berikut tabel yang menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner untuk masing-masing SKPD di Kabupaten Lombok Tengah. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian kuesioner.

Tabel 1. Penyebaran Kuesioner dan Informasi Tingkat Pengembaliannya

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	117
Kuesioner yang kembali	97

Kuesioner yang dapat digunakan	97
Kuesioner yang tidak digunakan (117-97)	20
Tingkat pengembalian kuesioner (97/117 x 100%)	83%
Tingkat pengembalian yang digunakan (97/117x 100%)	83%

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat pengembalian kuesioner dan yang digunakan sebesar 83% dan kuesioner tidak digunakan sebesar 17% karena adanya SKPD yang bendaharanya rangkap menjadi bendahara umum. Gambaran tentang karakteristik responden dalam penelitian

meliputi umur, tingkat pendidikan, masa kerja, jenis kelamin dan status sebagai Kasubag Keuangan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Umum pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah. Karakteristik responden tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Jensi Kelamin, dan Status

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Umur:		
< 30 tahun	9	9,3
31 - 40 tahun	53	54,6
41 - 50 tahun	28	28,9
> 51 tahun	7	7,2
Tingkat Pendidikan:		
SMA	13	13,4
D3	11	11,3
S1	69	71,1
S2	4	4,1
Masa Kerja:		
< 5 tahun	82	84,5
6 – 10 tahun	12	12,4
> 11 tahun	3	3,1
Jenis Kelamin:		
Pria	50	51,5
Wanita	47	48,5
Status:		
Sudah Kawin	94	96,9
Belum Kawin	3	3,1

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan karakteristik berikut: Dari sisi umur sebagian besar responden berkisar 31 – 40 tahun dengan jumlah 53 orang atau 53,6%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar umur responden dibagian keuangan SKPD Kabupaten Lombok Tengah berkisar 31- 40 tahun.berada pada usia yang masih produktif. Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah pendidikan S1 dengan jumlah 69 orang atau 71,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dibagian keuangan SKPD

Kabupaten Lombok Tengah memiliki ijazah S1. Berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden bekerja kurang dari 5 tahun, hal ini diketahui dari jumlah 82 orang dengan persentase sebesar 84,5%. Sehingga rata-rata masa kerja responden dibagian keuangan SKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah kurang dari lima tahun. Berdasarkan jenis kelamin responden pria lebih besar dengan jumlah 50 orang atau 51,5%, hal ini berarti sebagian besar responden dibagian keuangan SKPD Kabupaten Lombok Tengah berjenis kelamin pria. Berdasarkan status sebagian

besar responden sudah kawin jumlah 94 orang atau 96,9%, dan responden yang belum kawin berjumlah 3 orang atau 3,1%, hal ini berarti responden dibagian keuangan SKPD Kabupaten Lombok Tengah sudah menikah.

**Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006:48). Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan Korelasi Pearson (*Pearson Correlation*). Korelasi Pearson yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Apabila nilai koefisien korelasi *product moment* >  $r_{Tabel}$ , ( $\alpha = n-2$ )  $n =$  jumlah sampel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa item pernyataan/pertanyaan dalam kuisisioner adalah valid, demikian juga sebaliknya jika koefisien korelasi  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa item pernyataan/pertanyaan dalam kuisisioner tersebut adalah tidak valid.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada suatu kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesioner yang reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sitem pengendalian intern pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian syarat reliabel alat ukur terpenuhi.

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *non-prametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* program SPSS 17, dalam hal ini hasil uji normalitas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,576. Hal ini berarti nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal.

**Uji Multikolineritas**

Semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel independen tersebut.

**Uji Heteroskedastisitas**

Metode uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,853, sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,633, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,530, dan sistem informasi akuntansi keuangan sebesar 0,799. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi keempat variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Setelah asumsi klasik terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 17, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	T	Sig.	Keterangan
(Constant	.844	.208	4.053	.000	
Kompetensi SDM	.042	.071	.584	.560	Tidak Signifikan
SAKD	.282	.092	3.080	.003	Signifikan
Pemanfaatan TI	.173	.083	2.088	.040	Signifikan
SPIP	.324	.073	4.450	.000	Signifikan

*Adjusted R Square* = 0,740  
*e* = 0,22726

Sumber: Lampiran 11, diolah (2015)

Dari tabel diatas dapat dibuat estimasi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KILK = 0,844 + 0,42 X1 + 0,282 X2 + 0,173 X3 + 0,324 X4$$

### **Analisis Koefisien Determinasi (Uji Statistik R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006:83). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 3, diketahui nilai *adjusted R square* ( koefisien determinasi yang telah disesuaikan) sebesar 0,740. Nilai ini menunjukkan bahwa 74% variasi kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari semua variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan sisanya 26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Didalam perhitungan ini juga terdapat *standar error (e)* sebesar 0,22726 yang artinya kemungkinan kesalahan estimasi atau perhitungan dalam penelitian ini sebesar 0,22726.

### **Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji anova, didapat nilai F hitung sebesar 69.357 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel kualitas informasi laporan keuangan, atau dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

### **Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individual (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang terkait dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Tengah dapat dijelaskan dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data diatas uji statistik persialnya menunjukkan hasil sebagai berikut.

Variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) menunjukkan hasil dengan nilai t hitung = 0,584 < t tabel 1,660 dengan tingkat signifikansi 0,560 berada jauh diatas 0,05. Hal ini bermakna bahwa secara signifikansi kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) hasil yang signifikan positif dengan nilai t = 3,080 dengan tingkat signifikansi 0,003. Hal ini bermakna bahwa secara signifikan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) menunjukkan hasil yang signifikan positif dengan nilai t = 2,088 dan tingkat signifikansi 0,04. Hal ini bermakna bahwa secara signifikan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Selanjutnya variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X4) menunjukkan hasil yang signifikan positif dengan nilai t = 4,450 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini bermakna bahwa secara signifikan, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja sehingga antusiasme, semangat, dan kebutuhan yang mendorong seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai. Selain itu pentingnya komitmen organisasi akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Jadi, dengan meningkatkan motivasi kerja dan komitmen organisasi, diharapkan tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. Hal ini kemungkinan mempengaruhi hasil pengujian

data sehingga berpengaruh terhadap nilai signifikan.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki  $t$  hitung sebesar sebesar 0,584 dengan signifikansi 0,560 (lihat tabel 3). Nilai signifikansi 0,560 lebih besar dari derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga hipotesis (H1) ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM dan pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Darno (2012) menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Mahaputra (2014) menunjukan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Desianawati (2014) hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian lain terkait kualitas laporan keuangan, yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.**

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki  $t$  hitung sebesar sebesar 3,080 dengan signifikansi 0,003 (lihat tabel 3). Nilai signifikansi 0,003 kurang dari derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga hipotesis (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) menyatakan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik. Desianawati (2014) hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks teori *signalling*, penerapan SAKD oleh pemerintah telah menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah menerapkan SAKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan demikian semakin diterapkan SAKD akan semakin baik prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam rangka pertanggungjawabannya pelaksanaan APBD menjadi berkualitas. Sebaliknya dengan tidak diterapkan SAKD maka prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi tidak berkualitas.

#### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.**

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki  $t$  hitung sebesar sebesar 2,088 dengan signifikansi 0,040 (lihat tabel 3). Nilai signifikansi 0,04 kurang dari derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga hipotesis (H3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008) yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Celviana dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan



teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Darno (2012) berhasil menemukan bukti adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna.

Dalam konteks teori *signalling*, kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Dengan demikian masyarakat juga dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Hal ini memberikan pengertian, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin cepat dan mudah pelayanan publik dapat diakses sehingga akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya pemanfaatan teknologi informasi yang tidak baik menyebabkan pelayanan ke publik juga rendah sehingga informasi laporan keuangan menjadi tidak berkualitas.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki t hitung sebesar sebesar 4,450 dengan signifikansi 0,000 (lihat tabel 3). Nilai signifikansi 0,000 kurang dari derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga hipotesis (H4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madjham (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Sistem Pengendalian Intern dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asert Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Gorontalo Utara. Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Armando (2013) terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif. Mahaputra (2014) Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Oleh karena itu, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang didesain untuk menentukan nilai informasi laporan keuangan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas informasi laporan keuangan, sehingga memudahkan proses audit laporan keuangan. Dalam konteks *agency theory* hubungan keagenan ini dapat memunculkan *agency problem* berupa asimetri informasi dan konflik kepentingan. Dalam upaya mengurangi *agency problem*, pengungkapan akuntansi ke publik diperlukan. Terutama dalam menciptakan kualitas informasi laporan keuangan, pemerintah terus berusaha untuk memberikan *signall* yang baik kepada rakyat, melalui kegiatan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan semakin efektif dan efisien kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan, sehingga tujuan pemerintah daerah akan mudah tercapai. Sebaliknya semakin tidak efektif dan efisien sistem pengendalian intern pemerintah daerah diterapkan, akan semakin tidak efektif dan efisien pula kualitas informasi laporan keuangan daerah sehingga tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupatn Lombok Tengah dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

pengendalian intern pemerintah, tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja sehingga antusiasme, semangat, dan kebutuhan yang mendorong seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai. Selain itu pentingnya komitmen organisasi akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Jadi, dengan meningkatkan motivasi kerja dan komitmen organisasi, diharapkan tujuan pemerintah daerah dapat tercapai.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain : (1) Penelitian ini hanya meneliti variabel - variabel yaitu kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan SPIP, dan (2) Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

#### **Saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Bagi SKPD Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil penelitian disarankan kepada pimpinan disetiap SKPD Kabupaten Lombok Tengah agar bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan stimulus kepada staf bagian keuangan atau akuntansi supaya motivasi kerja terus ditingkatkan. Selain itu pentingnya komitmen organisasi akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Jadi, dengan meningkatkan motivasi kerja dan komitmen organisasi, diharapkan tujuan pemerintah daerah dapat tercapai yaitu opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus dipertahankan ditahun-tahun berikutnya.

Bagi penelitian berikutnya yaitu melengkapi penelitian selanjutnya dengan teknik observasi langsung serta menambah referensi-referensi terkait penelitian sejenis, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang lebih baik tentang kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti motivasi kerja dan variabel komitmen organisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*. Program Studi Akuntansi: Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Darno. 2012. *Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1 No. 1.
- Desianawati, Kadek. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e\_Jurnal Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2. No.1: 1-11
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS, Edisi-3*. Badan Penerbit. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, edisi-4*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us)
- Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional

- Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Simposium Nasional Akuntansi XI di Pontianak, 23-24 Juli.
- Kusumadjaja, Levina. 2014. *The Impact of Viral Marketing through Social Media on BCD's Consumer Brand Knowledge*. iBuss Management Vol. 2, No. 2, (2014) 162-172. Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya: International Business Management Program, Petra Christian University.
- Madjham, Anggraeni S. 2011. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ( Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bali: e-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Mantauv, Citra Suci. 2013. *Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sawahlunto*. e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 1 Nomor 2 Page 119-125, Publisher: LPPM STIE Pasaman Simpang Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhidin, Ali Sambas dan Abdurrahman Maman. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 59 Tahun 2007. *tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 56 Tahun 2005. *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 58 Tahun 2005. *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 13 Tahun 2008. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 60 Tahun 2008. *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010. *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Univeritas Widyatama, Bandung.
- Puspita, Rora & Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis edisi-4)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Graduate Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro.
- Tabachnick, B.G and FiddeL, L.S. 2007. *Experimental Designs Using ANOVA*. Belmont CA: Duxbury.
- Triandis, H. C, 1980, "Values Attitude and Interpersonal Behavior" Nebraska
- Trisnawati, Mya Dewi. 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. SNA 17 Mataram Lombok.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 24 Tahun 2005. *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- \_\_\_\_\_. Nomor 32 Tahun 2004.  
*tentang Pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004.  
*tentang Perimbangan Pemerintah  
Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Verawaty. 2013. *Analisis Komparasi Indeks  
Internet Financial Reporting  
Pemerintah Daerah di Indonesia.*  
Lembaga Penelitian Universitas Bina  
Darma, Palembang.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi  
(Konsep Dasar, Analisis, Desain dan  
Implementasi.* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Warisno, 2008, *Faktor-Faktor yang  
Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (SKPD) di  
Longkungan Pemerintah Provinsi  
Jambi,* Tesis, Sekolah Pascasarjana  
USU, Medan.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati.  
2010. *Pengaruh sumberdaya manusia  
dan pemanfaatan teknologi informasi  
terhadap keterandalan dan  
ketepatanwaktuan pelaporan keuangan  
pemerintah daerah dengan variabel  
intervening pengendalian intern  
akuntansi.* SNA 13: Universitas Jendral  
Soederman Purwokerto.
- Xu, Hongjiang. At.al. (2003). *Critical Succes  
Factors For Accounting Information  
Systems Data Quality.* Australian:  
University Of Southern Queensland.